I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia pemilihan wakil rakyat dilaksanakan dalam rentang waktu 5 tahun sekali. Partai politik menjadi jembatan penting (media formal) bagi warga negara untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pemilu. Partai politik digunakan sebagai lembaga politik formal yang berfungsi untuk mengagregasi dan mengartikulasikan berbagai kepentingan rakyat. Dalam konsep idealis, partai politik merupakan perwakilan rakyat di parlemen guna memberi kontrol efektif terhadap jalannya pemerintahan. Penerapan demokrasi atas perkembangan partai politik perlu mengedepankan norma-norma *egalitarianism* (persamaan) dan *Liberty* (kebebasan), bagi setiap warga negara untuk yang berpartisipasi di ranah politik.

Penerapan demokrasi yang diharapkan masyarakat Indonesia atas keberadaan partai politik ternyata belum menampakkan perubahan signifikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan pendewasaan politik rakyat. Partai politik dan budaya politik Indonesia belum mampu memberikan porsi yang seimbang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif di politik, terutama perempuan.

Budaya Indonesia cenderung tumbuh dalam lingkungan yang menganut paham patriarkhi. Keyakinan itu didasari oleh adanya nilai superiotas laki-laki berada di atas derajat perempuan. Sementara konsepsi terhadap gerakan keterwakilan perempuan terkesan terjun bebas dan terpinggirkan. Pandangan akan superioritas laki-laki tersebut tertanam kuat di masyarakat, menjadi dasar berpikir dan bertindak setiap orang. Membentuk paham atau konstruksi sosial dengan relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Secara kultural gerakan politik terkesan mengeksploitasi perempuan dibandingkan memberdayakannya.

Menempatkan perempuan hanya terlibat dalam urusan domestik semata, tidak dalam urusan publik.

Hal tersebut terlihat dari akivitas keseharian masyarakat misalnya, di keluarga, seorang istri hanya mengikuti keputusan yang diambil oleh suaminya. Pada tatanan luas, perempuan sering tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan konsep perencanaan strategis kebutuhan dan masa depan komunitas atau organisasinya. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kecerdasan pemikirannya guna mengabdi kepada masyarakatnya.

Padahal dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan bahwa ada komitmen berbagai bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak kemanusiaan setiap orang tanpa terkecuali, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik dan kelahiran maupun kedudukan.

Riewanto (2009: 16) menganggap bahwa urgensi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terutama mengaitkannya dengan kuota 30% adalah untuk memperjuangkan nasib dan kepentingan kaumnya. Perempuan akan berjuang menghapus ketimpangan kultur sosial yang dialaminya selama berpuluh-puluh tahun. Angka kemiskinan, jumlah buta huruf, rendahnya mutu kesehatan hingga pekerja sektor informal (buruh tani, migran, maupun PRT), kaum perempuan yang mendominasinya.

Arief (2008: 52) menjelaskan bahwa gerakan kebangkitan atau keterwakilan perempuan guna menghapus bias gender dimasyarakat digawangi oleh munculnya kaum feminisme. Kata feminisme pertama kali dimunculkan oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier tahun 1837

dan berkembang pesat sejak dipublikasikan oleh John Stuart Mill, *the Subjection of Women* (1869). Kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan di semua bidang dan dinomor duakan oleh laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang menggunakan paham patriarki. Dibidang sosial, pekerjaan, pendidikan, terutama politik hak-hak kaum perempuan lebih inferior dibandingkan yang dapat dinikmati laki-laki. Hal ini begitu dirasakan oleh masyarakat tradisional yang berorientasi agraris, menempatkan kaum laki-laki di depan, di luar rumah dan perempuan di dalam rumah.

Kaum feminis menuntut adanya persamaan hak bagi setiap individu. Tokoh feminis yang aktif mengkampanyekan persamaan hak tersebut seperti, Betty Friedan di tahun 1963 menuntut agar kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan *Equal Right Act* (1964) dimana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang. Memasuki era 1990 gerakan feminis semakin berkembang dan gencar mengkampenyekan gerakan anti penindasan dan marginalisasi kaum perempuan.

Kaum feminis mengkritik institusi *sains* yang merupakan struktur penting dalam masyarakat modern. Termarginalisasinya peran perempuan dalam institusi *sains* dianggap sebagai dampak dari karakteristik patriarkal yang menempel erat dalam institusi *sains*. Feminis menuntut hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dikotomi privat-publik dan diikutsertakannya perempuan dalam hak suara parlemen serta mendiami ranah politik kenegaraan.

Sejak 2004, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik, belum mampu mengangkat jumlah partisipasi perempuan hingga 30%. Harian Media Indonesia edisi 28 Desember 2009 menggambarkan jumlah partisipasi perempuan di lembaga publik, sebagai berikut :

Tabel 1. Perempuan di Lembaga Legislatif

Institusi	Periode 2004-2009 (%)	Periode 2009-2014 (%)
DPR RI	11	18
DPD RI	21	27
DPRD I	10	21

Sumber: Media Indonesia Tahun 2009

Tabel 2. Jumlah Perempuan Anggota DPR Terpilih 2009-2014 (per partai)

No	Parpol	Perempuan		Laki-laki		Total
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Demokrat	35	23.5	113	76.5	148
2	golkal	18	16.9	88	83	106
3	PDIP	17	18.1	77	81.9	94
4	PKB	7	25	21	75	26
5	PAN	7	15.2	49	84.8	46
6	PKS	3	5.3	54	94.7	57
7	PPP	5	13.2	33	86.8	38
8	Gerindra	4	15.4	22	84.6	26
9	Hanura	4	25	13	75	17

Sumber: Media Indonesia Tahun 2009

Tabel 3. Perempuan di Lembaga Eksekutif 2009

No	Institusi	Perempuan		Total
		Jumlah	(%)	
1	Menteri	5	14.7	34
2	Gubernur	1	3	33
3	Wakil Gubernur	1	3	33
4	Bupati/Wakikota	8	1.8	440
5	Wakil Bupati/Wakil Walikota	18	4	440

Sumber: Media Indonesia Tahun 2009

Tabel 4. Perempuan di lembaga Yudikatif

No.	Institusi	Perempuan		Total
		Jumlah	(%)	
1	MK	1	11	9 Hakim
2	MA	5	8.3	60 Hakim
3	Komisi	1	14	7 Komisioner

Sumber: Media Indonesia Tahun 2009

Tabel 5. Perempuan di Birokrasi 2007

Eselon	Perempuan	Laki-laki	Total
I	62	534	596
II	709	9.870	10.579
III	7.156	45.079	52.235
IV	45.240	153.900	199.140
V	2.815	9.922	12.737
Tenaga ahli	957.597	894.898	1.852.855
Staf	566.972	1.030.117	1.597.089
TOTAL	**1.580.911**	**2.144.320**	**3.725.231**

Sumber: Media Indonesia Tahun 2009

Tabel-tabel di atas memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan di ranah publik masih sangat minim. Di setiap lembaga negara masih di dominasi oleh kaum laki-laki. Berdasarkan tabel di atas terdapat dua asumsi yang menjelaskan rendahnya partisipasi perempuan. Pertama, rendahnya jumlah keterwakilan perempuan itu disebabkan oleh perempuan itu sendiri. Untuk itu, perempuan harus memiliki kekuatan dalam segi pendidikan dan pendapatan, agar mampu bersaing dengan laki-laki. Kedua, disebabkan oleh budaya patriarki, penguasaan kekayaaan pribadi (private property), kelas sosial, kapitalisme, dan aturan-aturan yang dibuat oleh negara (feminisme liberal, marxis, sosialis).

Menurut David Mc. Celland dalam Fakih (2008: 57) bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki dorongan atau hasrat berprestasi disetiap level yang digelutinya, *Need for Achievement*, (N'a*ch)*. Prestasi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan yang baik. Menurutnya hasrat berprestasi tersebut, bukan hanya untuk mendapatkan imbalan. Akan tetapi, untuk mendapatkan kepuasan secara batin. Setiap individu memiliki hak dan dorongan memanfaatkan peluang, dalam meraih kesempatan untuk membentuk dan merubah nasibnya sendiri. Prestasi tersebut bergantung dari tingkat motivasi dan kerja kerasnya setiap individu masyarakat.

Peningkatan keterwakilan perempuan merupakan hal penting. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan status sosial mereka melalui pemberdayaan perempuan. Mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini belum mendapat perhatian lebih di masyarakat. Melalui sistem ini pula proses kesejahteraan perempuan dapat ditingkatkan secara maksimal, memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap angota masyarakat tanpa memandang sara (Fakih. 2008).

Peningkatan keterampilan dan kompetensi perempuan dapat dilakukan melalui program ”*women in development”* yaitu memberikan program bagi ”peningkatan taraf hidup keluarga seperti, pendidikan dan keterampilan” serta ”kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan”. Program ini menjadi pemicu meningkatnya keahlian perempuan yang dapat merangsang meningkatnya partisipasi politik.

Keberadaan kaum perempuan di Indonesia, secara kuantitas setara dengan laki-laki, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pun sama. Menggunakan N’Ach yang dimiliki, kaum perempuan mampu bersaing dengan laki-laki secara lebih sehat. Perempuan yang menjadi caleg tentu memiliki pemahaman dalam menangkap issu, rumor, maupun opini publik yang berkembang di masyarakat. Isu itu dijadikan sebagai wacana politiknya sebagai media yang mampu mempengaruhi persepsi pemilih. Hal ini memberikan persepsi bahwa perempuan juga mampu membentuk sistem ketatanegaraan yang lebih mapan di Indonesia. Bergantung dari motivasi, aturan-aturan negara, pemanfaatan peluang dan kesempatan serta penggunaan strategi yang baik.

Salah satu strategi yang dapat digunakan caleg perempuan dalam meningkatkan perolehan suaranya yaitu, melalui retorika tentang kesamaan dan kesetaraan. Strategi ini dilakukan dengan argumentasi persuasif yang mampu mempengaruhi persepsi masyarakat tentang

kesamaan dan kesetaraan. Wacana-wacana politik perempuan, pidato maupun tulisan-tulisan yang digerakkan oleh para pemimpin partai politiknya menjadi tindakan konkrit atas strategi tersebut.

Menurut Lovenduski (2008: 106) bahwa secara historis peningkatan partisipasi politik perempuan dilakukan melalui strategi-strategi institusional, bekerja di dalam partai-partai dan menerima peraturan-peraturan permainan yang ada. Proses ini dilakukan agar perempuan mampu memahami aturan konstitusional yang diterapkan partai politik. Selain itu, kaum feminis juga sangat gencar mewacana dasar-dasar persamaan gender ke seluruh elemen masyarakat. Hal ini terutama dilakukan pada negara yang menganut demokrasi modern.

Strategi yang dilakukan caleg perempuan tentu dengan mamasifkan wacana persamaan tersebut di tengah masyarakat. Caleg perempuan dapat menggunakan komunitasnya sebagai bagian dari komoditas politik. Kaum perempuan akan lebih cepat mengembangkan isu dan mempertahankannya secara permanen. Proses tersebut dapat dilakukan melalui, kelompok arisan, berbelanja di pasar, forum pengajian dan sebagainya.

Selain itu, caleg perempuan harus memiliki pertautan idealisme dengan komponen masyarakat di luarnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan lembaga-lembaga profesional lainnya. Pendekatan yang dilakukan adalah bekerja sama dengan para caleg lain dalam partai politiknya dan membuat sekutu dengan mitra-mitra sosial serta paguyuban-paguyuban warga yang bersifat sukarela. Membangun kerja sama dengan beberapa caleg merupakan suatu upaya untuk menghimpun dan membentuk agenda politik bersama.

Kerja sama politik yang dilakukan dengan berbagai pihak menjadi sangat efektif untuk menciptakan atau meningkatkan isu strategis di masyarakat. Caleg perempuan tentu

membutuhkan informasi lebih atas permasalahan di masyarakat. Lembaga-lembaga ini akan sangat membantu caleg guna mendapatkan informasi secara akurat. Dengan demikian, caleg akan mudah melakukan pemetaan isu yang tepat untuk digulirkan saat berkampanye.

Pencitraan perempuan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan strategi-strategi politik klasik seperti, pewacanaan dan perdebatan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik. Selain itu, pemahaman caleg perempuan terhadap peraturan tentang pencalonan anggota legislatif, mobilitas dukungan, pembangunan jaringan, penataan ulang wacana politik dan akumulasi serta sosialisasi visi-misi mampu menjadi pengeksposan tersendiri atas berbagai keahlian yang dimiliki, sesuai tugas dan fungsinya dalam mengusung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Secara umum, pemilih menjatuhkan pilihannya didasari oleh orientasi *policy problem solving* dan orientasi *ideology* (Firmanzah, 2008: 109). Orientasi *policy problem solving* adalah pemilih menaruh perhatiannya pada caleg perempuan yang mampu menawarkan solusi terbaik terhadap permasalahan masyarakatnya. Solusi yang ditawarkan caleg perempuan harus didukung oleh data-data yang valid dan disampaikan melalui argumentasi persuasif secara matang.

Orientasi *ideology* menggambarkan bahwa masyarakat akan memilih caleg perempuan didasari oleh adanya ikatan ideologi. Pemilih ideologi lebih menekankan aspek-aspek subjektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai politik atau kedekatan subjektifitas caleg perempuan dengan masyarakat, kemungkinan dipilih semakin besar.

Untuk itu, caleg perempuan harus mampu mengelola sistem komunikasi dengan baik. Komunikasi tersebut berfungsi untuk menyampaikan ide perubahan kepada masyarakat

dengan cara yang santun dan bijak. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah menyerap ide perubahan yang ditawarkan. Komunikasi dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media (Massa dan Elektronik). Media komunikasi tersebut seperti, telephon, koran, majalah, televisi, radio, internet, baleho, spanduk, stiker dan sebagainya.

Strategi caleg perempuan dengan menggunakan komunikasi efektif perlu memperhatikan berbagai objek sasaran yang dituju seperti, latar belakang pendidikan, budaya, mata pencaharian, dominasi gender, suku, agama, sehingga pola penyampaian informasi dapat berjalan maksimal. Selain itu, caleg perempuan perlu memanfaatkan sisi feminisme (keperempuanan) dan pengetahuan (N'ach) yang dimilikinya. Dengan demikian, masyarakat akan mudah tersentuh oleh pendekaan yang dilakukan secara persuasif tersebut.

Komunikasi tidak terlepas dari interaksi dan aktivitas keseharian masyarakat. Indikasi terjadinya konflik dimasyarakat sangat mungkin terjadi. Konflik tersebut terjadi atas kesalahpahaman dari komunikasi yang terbangun. Caleg perempuan harus mampu mengelola konflik yang berkembang guna dijadikan sebagai komoditas politiknya yang memungkinkan strategi dapat berfungsi dengan baik. Menghindari dampak negatif yang muncul atas interaksi yang terbangun dimasyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi calon legislatif perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif 2009?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai strategi yang digunakan calon legislatif perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif 2009.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya pada kajian sosiologis.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para aktivis perempuan, pemerintah, partai politik, masyarakat luas dalam memahami serta mengkaji berbagai strategi caleg perempuan, khususnya untuk memenangkan pemilihan anggota legislatif 2009.